

---

**KOMUNIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
(Studi Deskriptif Kualitatif Negosiasi Kebijakan Revitalisasi Trotoar Pemerintah Daerah di  
Jalan Kemang Raya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta)**

Oleh  
**Satrio Prasajo Soerarso<sup>1)</sup> & Lukman Yudho Prakoso<sup>2)</sup>**  
<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia  
Email: <sup>1</sup>[reinaza1991@gmail.com](mailto:reinaza1991@gmail.com) & <sup>2</sup>[kamalekumdeplek@gmail.com](mailto:kamalekumdeplek@gmail.com)

**Abstract**

Regional government implementing sidewalks revitalization policy properly used. Arising problems from implemented policy by regional government should integrative negotiate ways with residents near Kemang Raya Street South of DKI Jakarta province. The research purposed to find and analize integrative negotiation process between regional government that represented by exclusive team with the residents, Steps of efforts implemented the policy, and the supporting and inhibiting factors of the integrative negotiation process. Integrative negotiation theory which is prioritized because of the statements of local governments that prioritize win - win solutions. The method descriptive study with qualitative approaching. Data obtained through direct interviews and research from documentations. The results of this study indicate that the negotiation process carried out with the pure integrative method is the dynamics of the distributive method with the steps that are in accordance with the negotiation of the integrative method ending with distributive factors that need to be considered in the future the local government in carrying out integrative negotiations.

**Keywords: Public policy, Political Communication, Integrative Negotiation & Sidewalks Revitalization.**

**PENDAHULUAN**

Gubernur menjadi wakil dari pemerintah pusat yang menjadi kepala atau pimpinan dari pemerintah daerah yang mempunyai tugas wewenang untuk melakukan evaluasi tentang tata ruang daerah yang dipimpinya tidak bisa bekerja sendiri, oleh karena itu dibantu oleh instansi – instansi terkait dalam menjalankan tugasnya. Proses koordinasi yang dilakukan Anies Baswedan selaku pimpinan daerah menggunakan kegiatan komunikasi politik. Seperti yang disampaikan Kusmanto (2014) tertulis pada penelitian Hanani dkk pada jurnal Turast bahwa politik adalah ilmu yang digunakan dalam hal memerintah dan mengatur masyarakat, politik juga adalah seni bagi manusia. pada buku karangan Dr. Thomas Tokan Pureklolon yang berjudul Komunikasi Politik menyatakan politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara

melaksanakannya, dalam pelaksanaannya membutuhkan kebijakan – kebijakan umum (*Public Policies*) untuk mengatur, membagi, atau mengalokasikan sumber – sumber yang ada yang dikatakan oleh Sumarsono (2006). Untuk melaksanakan kebijaksanaan – kebijaksanaan itu, perlu adanya kekuasaan (*Power*) dan kewenangan (*Authority*) untuk membina kerja sama maupun menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. (Miriam Budiarjo, 2013). Hubungan yang terjalin terdapat komunikasi dalam hal ini disebutkan sebagai komunikasi politik. Komunikasi politik yang terjadi pada saat ini bukan hanya antar aktor politik, tetapi antara aktor politik dengan pemerintahan juga terjadi komunikasi politik. Menurut seorang pakar politik, Maswadi Rauf, komunikasi politik adalah objek kajian ilmu politik karena pesan – pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yang berkaitan

dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik. Rochajat dan Sumarno (2006).

Berbeda pula situasi yang terjadi di daerah Kemang yang menjadi *iconic project* dan prestasi luar biasa bagi pemerintah daerah DKI Jakarta. Karena yang terjadi di Kemang dalam proses pembangunan dalam rangka revitalisasi trotoar disana pembebasan lahan tanpa menggunakan anggaran yang besar bahkan tanpa mengeluarkan biaya untuk membebaskan lahan. Sesuatu yang dapat dikatakan sangat tidak mungkin yang dilakukan oleh pemerintah ditambah daerah Kemang merupakan kawasan padat pemukiman dan termasuk kawasan perkembangan ekonomi di DKI Jakarta.

Upaya Pemerintah daerah DKI Jakarta terutama Anies Baswedan sebagai Gubernur atau pemimpin pemerintah daerah menunjuk tim khusus yang memiliki otoritas dan wewenang untuk melaksanakan pembangunan revitalisasi trotoar di jalan Kemang Raya daerah Kemang di wilayah provinsi daerah DKI Jakarta serta komunikasi politik dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan kebijakan yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan dalam kebijakan revitalisasi trotoar di wilayah DKI Jakarta terutama daerah Kemang yang terlaksana dengan baik serta tanpa mengeluarkan biaya untuk membebaskan lahan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penulisan artikel ini adalah dengan Deskriptif Kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna karena penelitian ini mengeksplorasi fenomena proses negosiasi kebijakan revitalisasi pemerintah daerah di sekitar jalan Kemang Raya Provinsi DKI Jakarta. Data – data yang diperoleh dari beberapa dokumentasi dan wawancara terhadap pelaku yang terlibat dalam proses negosiasi dengan

menghasilkan data primer dan sekunder kemudian data diolah melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data melalui analisis Hermeneutik serta kebasahan melalui triangulasi sumber dan teori yang relevan dengan negosiasi yang terlaksana.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini mendeskripsikan tentang proses negosiasi, langkah – Langkah upaya negosiasi dan faktor pendukung serta faktor penghambat negosiasi integratif yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan pemilik persil dan warga daerah Kemang yang terkena dampak pembangunan serta menguraikan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan tema.

### **Gambaran Daerah Kemang Jakarta Selaatan**

Daerah Kemang merupakan salah satu desa di kelurahan Bangka yang ditetapkan sebagai daerah resapan air tidak diperbolehkan ada banyak bangunan yang menutupi permukaan tanah menurut Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta tahun 1965 sampai dengan 1985.

Pesatnya perkembangan daerah Kemang ini ditinjau dari warga yang melakukan aktifitas pembangunan bangunan yang fungsinya untuk melakukan perdagangan dan jasa atau penyerdahan kata digunakan sebagai pusat perniagaan. Dahulunya sebagai kawasan perkebunan, berangsur menjadi kawasan resapan air, berubah fungsi kembali menjadi permukiman dan pada akhirnya pada saat ini menjadi pusat perniagaan yang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku tidak sesuai bahkan bisa dikatakan sebagai kawasan perniagaan yang ilegal. Pemerintah daerah DKI Jakarta yang mengerti dan memahami permasalahan tersebut berupaya bersikap fleksibel atau tidak kaku dalam menetapkan aturan, meskipun penggunaan lahan tersebut pada kenyataan dilapangannya menjadi kawasan perniagaan dan perkantoran tidak sesuai dengan pengaturan zonasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah bernegosiasi dengan

para pemilik lahan di daerah Kemang agar membantu kerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk merevitalisasi sarana infrastruktur trotoar di jalan Kemang Raya dengan menerapkan pola kolaborasi dan partisipasi dengan warga disekitar jalan Kemang Raya.

## Hasil Penelitian

### 1. Awal Mula Terjadinya Permasalahan

Daerah Kemang merupakan kawasan komersil secara tampilan meskipun terdapat permukiman yang padat didalamnya. Pusat perniagaan dan pusat perkantoran yang padat termasuk dalam kawasan yang menjadi prioritas pemerintah daerah DKI Jakarta untuk dilaksanakannya kebijakan revitalisasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penetapan daerah Kemang menjadi prioritas bukan hanya hasil dari penelitian pemerintah daerah saja, tetapi banyak aspirasi yang diterima oleh pemerintah daerah dari warga daerah Kemang untuk diadakannya pembangunan. Selain itu, sering terjadinya bencana banjir di daerah Kemang yang disebabkan oleh sistem *drainase* yang tidak baik. Sehingga kepadatan penduduk yang diikuti dengan kepadatan kendaraan yang melintas di jalan – jalan daerah Kemang disertai banjir tiap tahun merupakan kawasan yang tidak sehat sehingga menjadikan faktor pendukung pemerintah daerah menetapkan Kemang menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan revitalisasi sarana infrastruktur trotoar. Ditambahkan rencana pemerintah daerah menjadikan daerah Kemang kedepannya akan menjadi destinasi wisata *iconic* di Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.

### 2. Proses Negosiasi Integratif Antara Pemerintah Daerah Diwakilkan Tim Khusus Dengan Warga Yang Terkena Dampak.

Kondisi yang telah dihadapi pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan revitalisasi trotoar yang berada di daerah DKI Jakarta terutama di jalan Kemang Raya Jakarta Selatan, peran serta dari warga daerah Kemang yang menyampaikan aspirasi – aspirasi nya dan diterima oleh pemerintah daerah melalui jalur

yang berjenjang. Penerimaan masukan dan saran dari warga daerah Kemang menjadi latar belakang dikeluarkan kebijakan revitalisasi trotoar yang berada di daerah Kemang terutama di jalan Kemang Raya dikaji oleh pemerintah daerah dan direalisasikan dalam bentuk langkah awal memberikan gambaran yang akan dikerjakan dan hasilnya dalam sebuah bentuk paparan video animasi yang dilakukan oleh tim khusus Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta pada saat sosialisasi pertama sebagai bentuk tindakan responsif dari pemerintah daerah atas masukan dan saran dari warga daerah Kemang.

Sosialisasi yang kedua yang dilakukan adalah penyampaian jadwal kerja dan menghadirkan kontraktor, pengawas proyek dan konsultan proyek untuk melakukan pendekatan *door to door* kepada pemilik persil untuk pelaksanaan pembangunan di area atau lahannya karena setiap pemilik persil memiliki kepentingan masing – masing.

### 3. Langkah – Langkah Upaya Negosiasi Integratif Tim Khusus Dari Pemerintah Daerah Agar Terlaksananya Kebijakan.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta yang berorientasikan keadilan dan kesetaraan memiliki nilai – nilai yang terkandung dalam pemerintahan yang demokrasi.

Negosiasi integratif yang telah dilaksanakan tim khusus tujuannya agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah terlaksana dengan baik dan lancar karena fokus dari kebijakan tersebut sebagai solusi atau pemecahan masalah dari kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta terutama di jalan Kemang Raya daerah Kemang yang pernah menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah yang tidak kunjung selesai selama bertahun – tahun belakangan ini, meskipun secara hukum pemerintah daerah memiliki otoritas dalam pengaturan diwilayah nya tetapi pemerintah daerah melalui tim khusus yang dibentuk tetap memperhatikan moral warga yang berada di sekitar jalan Kemang Raya.

Upaya yang dilakukan dari tim khusus dengan membuat sebuah perjanjian kerjasama (PKS) antara pemerintah daerah

dalam hal ini diwakilkan oleh Dinas Bina Marga dengan warga. Terdapat 10 Pasal yang ada didalam PKS. Isi pasal 1 didalam PKS yang terbuat memiliki maksud sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penataan kawasan Jalan Kemang Raya dan sekitarnya Kota Administrasi Jakarta Selatan dan bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan, keamanan dan ketertiban bagi para pengguna jalur pejalan kaki di kawasan jalan Kemang Raya dan sekitarnya, Kota administrasi Jakarta Selatan. Pasal 3 menjelaskan tentang ruang lingkup kerjasama bahwa kedua pihak sepakat bahwa ruang lingkup kerjasama yang akan dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini adalah pemanfaatan sebagian tanah dan pengelolaan kawasan/ trotoar dan bangunan pelengkap jalan yang dikuasai oleh pihak kedua dalam hal ini warga tanpa peralihan hak atas tanah, sehingga pihak kedua tetap berhak atas penguasaan dan pemilikan tanah yang akan digunakan sebagai trotoar dan bangunan pelengkap jalan.

#### 4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Hasil Dari Proses Negosiasi Integratif

Beberapa faktor yang mendukung berhasilnya dari negosiasi integratif yang dilaksanakan oleh tim khusus dari pemerintah daerah DKI Jakarta yang diketuai oleh Riri Asnita antara lain:

- a. Tujuan dari revitalisasi pembangunan trotoar di sekitar jalan Kemang Raya. Dengan adanya PKS yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang diwakilkan oleh Dinas Bina Marga menjadikan *Joint Goal* yang disepakati bersama untuk menciptakan ketertiban dan kerapian di sekitar jalan Kemang Raya.
- b. Perbedaan pendapat dalam melaksanakan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah antara tim khusus dari pemerintah daerah dengan warga sekitar jalan Kemang Raya terus menerus dibicarakan dengan baik dan pelaksanaan nya tidak dalam forum tetapi lebih dari pendekatan orang per orang atau *door to*

*door*. Tekad yang dilakukan oleh tim khusus untuk mencapai kesepakatan bersama dengan warga tetap dilakukan agar tidak ada perasaan yang merugikan secara materil dan psikis satu sama lain.

- c. Pendekatan yang dilakukan tim khusus tidak kepada semua warga yang berada disekitar jalan Kemang Raya, tetapi kepada warga yang merasa dirugikan saja. Dengan pendekatan yang intensif kepada warga yang memiliki konsensus negatif dari kebijakan publik untuk merevitalisasi pembangunan trotoar di jalan Kemang Raya.
- d. Dengan dibuatkannya PKS mengikat satu sama lain antara pemerintah dan warga menjadikan motivasi bagi pihak pemerintah daerah yang diwakilkan tim khusus dengan warga sekitar jalan Kemang Raya.
- e. Keterbukaan informasi yang dilakukan oleh tim khusus dari pemerintah daerah dari segi anggaran yang dikeluarkan, prosesi kerja dan keterlibatan pihak – pihak disampaikan melalui sosialisasi tahap pertama yaitu tahap perencanaan dan tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan melalui sosialisasi secara langsung bertatap muka dengan warga, melalui media elektronik dan melalui media cetak.
- f. Pendekatan kepada tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat yang dilakukan oleh tim khusus dari pemerintah daerah disampaikan dalam forum sosialisasi dan pertemuan secara pribadi kepada tokoh tersebut.

Selain dari faktor pendukung terciptanya proses negosiasi integratif yang dilaksanakan oleh tim khusus dari pemerintah daerah dengan warga sekitar jalan Kemang Raya terdapat **faktor yang menjadi penghalang** terciptanya negosiasi integratif, antara lain :

- a. Waktu yang tersedia bagi tim khusus dalam melaksanakan kebijakan publik sangat terbatas sehingga pendekatan yang

dilakukan terkesan buru – buru. Sehingga timbul konsensus – konsensus negatif yang terjadi setelah adanya kesepakatan bersama.

- b. Keterbatasan dari jumlah tim khusus dari pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi kepada warga sekitar jalan Kemang Raya untuk pendekatan *door to door*. Sehingga tenaga, pikiran dan waktu yang benar – benar dimaksimalkan sebaik mungkin dalam persiapan dan penerapan kebijakan.
- c. Keterbatasan komunikasi yang disampaikan oleh Tim khusus pada saat sosialisasi menimbulkan pemahaman yang tidak sejalan dengan tujuan dari komunikasi yang disampaikan dari pemerintah dan warga sekitar.
- d. Timbul kepentingan – kepentingan yang berbeda dari pemilik persil untuk melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan tim khusus dari pemerintah daerah DKI Jakarta, tim khusus mengharuskan untuk melakukan pendekatan – pendekatan secara interpersonal kepada pemilik persil disekitar jalan Kemang Raya dan merangkum dari permasalahan – permasalahan tersebut menjadi beberapa poin yang akan dibuat dalam poin – poin PKS antara pemerintah daerah dan warga sekitar jalan Kemang Raya.
- e. Konsensus – konsensus negatif yang disampaikan oleh pihak ketiga dalam hal ini pengacara – pengacara dari pemilik persil yang melakukan penyelesaian melalui jalur hukum yang cukup menguras pikiran dari tim khusus dari pemerintah daerah DKI Jakarta yang menjadi pelaksana dilapangan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Negosiasi dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah DKI Jakarta dilakukan karena Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjadi unsur pelaksana adalah pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah DKI Jakarta

yang dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk untuk bertanggung jawab penuh dilapangan.

Pada tahap perencanaan dikeluarkannya kebijakan publik pemerintah daerah DKI Jakarta melakukan kegiatan proaktif untuk menggalang aspirasi dari warga DKI Jakarta mengenai permasalahan kemacetan yang berada di DKI Jakarta tidak kunjung selesai. Melalui sistem *bottom up* masukan dan saran dari warga DKI Jakarta terutama daerah Kemang yang berada di sekitar jalan Kemang Raya sebagai dasar pembuatan kebijakan publik kemudian diolah data – datanya menjadi sebuah solusi dari permasalahan kemacetan di jalan Kemang Raya.

Karena keaneka ragaman dari warga sekitar jalan Kemang Raya menimbulkan beberapa kepentingan dari warga yang berbeda – beda. Untuk menyelaraskan persamaan dan menekan perbedaan dari kepentingan warga, pemerintah daerah melalui tim khusus melakukan negosiasi kepada warga sekitar jalan Kemang Raya agar tujuan dari kebijakan revitalisasi trotoar di jalan Kemang Raya tetap terlaksana untuk kepentingan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm:267
- [2] Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. Boston: Houghton Mifflin.
- [3] Antar, Venus. 2004. *Manajemen kampanye: panduan teoritis dan praktis dalam mengeksekutifkan kampanye komunikasi*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media
- [4] Arfani, Riza Noer. 1998. Negosiasi Integratif Untuk Timor Timur. *Jurnal Ketahanan Nasional, Volume III no. (2) Agustus 1998*.
- [5] Arif, Firman Nur., & Okto Risdianto Manullang. (2017) *Kesesuaian Tata Guna Lahan Terhadap Penerapan Konsep Transit Oriented Development (TOD) Di Kota Semarang*. Biro Penerbit Planologi Undip, 13, 301 – 3011

- [6] Arifin, Anwar. 2003. *Ilmu komunikasi: suatu pengantar ringkas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [7] Budiarjo, Miriam. 1978. *Dasar – dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- [8] Cangara, Hafied. 2016. *Komunikasi Politik : Konsep, Teori, dan Strategi*. PT. Rajagrafindo Persada: Depok. Halaman 133, 168.
- [9] Arief, R., Midhio, I. W., Risman, H., Anwar, S., & Prakoso, L. Y. (2021, June 1). Makassar War in the Perspective of the Indonesian Total War. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.02.291>
- [10] Arief, R., Prakoso, L., & Risman, H. (2021). UNDERSTANDING NATIONAL IDENTITY TO CREATE LOVE AND PROUD OF BEING A PART OF THE INDONESIAN NATION. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2549-2556. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i11.518>
- [11] Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [12] Fadila, Mira. 2019. *Seni Debat dan Negosiasi*. Yogyakarta : Araska
- [13] Ferdiawan, Wiwid, M. Basri, M Syaiful. “ Upaya Lobby Himpunan Mahasiswa Islam Kepada Presiden Soekarno Pada Tahun 1965”, Bandar Lampung, Universitas Negeri Lampung, 2017.
- [14] Fisher, R.; Ury, W. *Getting to Yes Negotiating Agreement Without Giving in*; Penguin Putnam Incorporated: London, UK, 1983.
- [15] Goldman Alvin L. and Jacques Rojot. 2002. *Negotiation: Theory and Practice*. Amsterdam: Kluwer.
- [16] Gorewitz, et al (2006). *Communicating the Benefits of TOD: The City of Evanston’s Transit-Oriented Redevelopment and the Hudson Bergen Light Rail Transit System*. Center for TOD.
- [17] Hadi, Sutrisno. 1990. *Metodologi Research Jilid II*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- [18] Hamudy, Moh. Ilham. 2010. Negosiasi dalam Reformasi Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Volume 17 No. 1 Januari – April 2010*. halaman 52 – 60. ISSN 0854-3844
- [19] Hanani, Silfia dkk. 2019. Eksistensi dan Pencitraan Politikus dalam Metigasi Bencana Banjir di Betung Berdarah Tebo Hilir Provinsi Jambi. *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*. *Turast* 7 (2) 2019. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/turast/index>. Diakses pada tanggal 7 Maret 2021
- [20] Harun, Rochajat dan Sumarno, A.P. 2006. *Komunikasi Politik sebagai Suatu Pengantar*. Penerbit CV. Mandar Maju: Bandung.
- [21] Harris, A., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Strategi Pertahanan Laut dalam Rangka Ancaman Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia II. *Journal of Social and Political Sciences*, Vol.4 No.2 (2021), 5(1), 15–30. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.02.283>
- [22] Hasyim, L. O. M., Prakoso, L. Y., & Risman, H. (2021). Perang Semesta (Total War) Strategy for Preventing Terrorism Act (Study in Sultan Hasanuddin International Airport). *Journal of Social and Political Sciences*. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.02.277>
- [23] <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190412130625-20-385658/pemprov-dki-akan-jadikan-kemang-kawasan-ikon-jakarta-selatan> diakses pada tanggal 28 Agustus 2020
- [24] <https://voi.id/memori/1369/asal-usul-kemang-daerah-resapan-yang-kini-padat-penduduk> diakses pada tanggal 28 Agustus 2020

- [25] <https://www.itdp.org/library/standards-and-guides/tod3-0/what-is-tod/> 26 september 2020
- [26] Transit Oriented Development Institute (2019). Transit Oriented Development.
- [27] <http://www.tod.org/> 26 september 2020
- [28] <http://www.cityofsacramento.org/Community-Development/Planning/Major-Projects/TOD-Ordinance> 26 september 2020
- [29] <https://www.handalselaras.com/transit-oriented-development-tantangan-perkotaan/> 26 september 2020
- [30] *Institute for Transportation and Development Policy (ITDP)* 2014.
- [31] Institute for Transportation & Development Policy (2019). *What is TOD?*.
- [32] Jackman, Ann. 2005. *How to Negotiate*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- [33] Khisty, C Jotin dan Lall, BKent. 2005. *Dasar-dasar Rekayasa Transportasi Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- [34] Keputusan Mahkamah Agung Nomor 38/P.PTSVIII/2019/42P/HUM/2018 Tentang Penutupan Jalan Sebagai Tempat Berdagang.
- [35] Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi penelitian kualitatif-kuantitatif*. UIN-Maliki Press: Malang. Halaman 369.
- [36] Kristi Poerwandari. 2005. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Perilaku Manusia*. LPSP3 FP UI: Depok. Halaman. 143.
- [37] Kusmanto, Heri. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2(1).
- [38] Lewicki, Roy J, Bruce Barry, David M. Saunders. 2015. *Negosiasi*. Penerbit : Salemba Humanika,. Jakarta.
- [39] Lewicki, R.J.;Weiss, S.E.; Lewin, D. Models of conflict, negotiation and third party intervention: A review and synthesis. *J. Organ. Behav.* 1992, 13, 209–252.
- [40] Lewicki, R.J.; Litterer, J.A. Negotiation; Richard, I.L., Irwin, D., Eds.; Inc. LewickiNegotiation: Homewood,CA, USA, 1985.
- [41] Marshall, Catherine, Gretchen B Rossman. 1995. *Designing Qualitative Research (Second Edition)*. London: Sage Publications, International Eduvational and Professional Publisher
- [42] McNair, Blair. 1999. *An introduction to political communication* (2nd ed.). New York: Routledge.
- [43] Melyanto, Sito., & Sudardjo. 1998. Negosiasi Saat Ini: Semua Menang. *Buletin Psikologi*, Tahun VII. No. 2. Desember 1999 hal. 40-47.
- [44] Mas'oed, Mochtar. 1990. *Konsep Hubungan internasional : Kepentingan Nasional, Power, Integrasi, Deterrence*. *Ilmu Hubungan Internasional*. Jakarta: LP3ES. Hal 116.
- [45] Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Erlangga: Jakarta. Halaman 151
- [46] Mulyana, Deddy. 2017. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* edisi cetakan ke 21. PT Remaja Rosdakarya: Bandung. Halaman 147.
- [47] Moh.Mahfud MD, Dr, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*,(Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 86
- [48] Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Rosdakarya, Edisi Revisi cetakan 36. Halaman 4, 93, 247, 330.
- [49] Madrohim, Madrohim and Prakoso, Lukman Yudho and Risman, Helda, Pancasila Revitalization Strategy in the Era of Globalization to Face the Threat of National Disintegration (May 3, 2021). *Journal of Social and Political Sciences*, Vol.4 No.2 (2021), Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3838454>
- [50] Mulyadi, M., Prakoso, L., & Mudhio, I. (2021). KONFRONTASI MILITER PEMBEBASAN PAPUA BARAT DALAM PERSPEKTIF STRATEGI PERANG SEMESTA. *Jurnal Inovasi*

- Penelitian, 2(1), 265-276.  
<https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.635>
- [51] Nurbantoro, Endro and Risman, Helda and Prakoso, Lukman Yudho, The Total War Strategy: Challenges in Facing Traitor of the Nation: A Historical Approach During the Indonesian War of Independence (May 9, 2021). *Journal of Social and Political Sciences*, Vol.4 No.2 (2021), Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3842393>
- [52] Nurhuda, N., Widjayanto, J., & Prakoso, L. (2021). STRATEGI MENCEGAH MUNCULNYA EKSES NEGATIF PASKA PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2523-2536.  
<https://doi.org/10.47492/jip.v1i11.516>
- [53] Neuman, W. L. (2003). *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*. Fifth Edition. Boston: Pearson Education
- [54] Ni"matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm:266-267
- [55] Pureklolon, Thomas Tokan. 2016. *Komunikasi Politik, Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus, dan Negarawan*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, Halaman 2
- [56] Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat.
- [57] Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 25 ayat 1 tentang Ketertiban Umum.
- [58] Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030
- [59] Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
- [60] Prakoso, L. Y., & Suhirwan. (2021). Defense Strategy Policy through Revitalization of East Surabaya Shipping Lanes. *ITALENISCH*, 11(2), 249–263.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1115/italienisch.v11i2.117>
- [61] Pramono, B., & Prakoso, L. Y. (2021). Political Policy for the Papuan Issue in the Context of National Defense. *ITALENISCH*, 11(2), 271–275.  
<http://italienisch.nl/index.php/VerlagSauerlander/article/view/118>
- [62] Rahim, M.A. *Theory and Research in Conflict Management*; Greenwood Publishing Group: Santa Barbara, CA, USA, 1990.
- [63] Richard Perloff, *Political Communication* (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 1998). Halaman 8.
- [64] Roy J. Lewicki dkk, *Negosiasi*, Salemba Humanika, Jakarta 2015. Hal. 89
- [65] Rutman, G.L. *Migration and Economic Opportunities in West Virginia*. *Rural Sociology*, 1970, 35 (2), 206–217.
- [66] Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. CV. Alfabeta: Bandung. Halaman 156.
- [67] Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & D*. CV. Alfabeta: Bandung. Halaman 338.
- [68] Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan*. CV. Alfabeta: Bandung. Halaman 204 – 205.
- [69] Sukmadinata, N.S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [70] Sumarsono S., Ssarso A., Mansyur H., dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- [71] Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Lukman Offset YPAPI: Yogyakarta.
- [72] Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Lukman Offset YPAPI: Yogyakarta.
- [73] Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29.
- [74] Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 A ayat 2.



- 
- [75] Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012, Bab VII, Bagian kesatu Tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 51 Ayat 14.
- [76] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 127 Ayat 1 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- [77] Walton, R.E.; McKersie, R.B. A Behavioral Theory of Labor Negotiations: An Analysis of a Social Interaction System; Cornell University Press: Ithaca, NY, USA, 1991
- [78] Widodo, Joko. 2001. *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendekia: Surabaya.
- [79] Wiksana, Wiki Angga. 2017. Studi Deskriptif Kualitatif tentang Hambatan Komunikasi Fotografer dan Model dalam Proses Pemotretan. *Jurnal MediaTor, Volume 10 no. 1, Juni 2017*. Halaman 121 – 131.
- [80] Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo: Yogyakarta.
- [81] Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Pressindo: Yogyakarta.
- [82] Zubairi, Achmad Ilham. “Komunikasi Politik dan Strategi Negosiasi Dalam Perdamaian Dengan Din Minimi”, Jakarta MIKOM Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN